

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kebijakan luar negeri suatu negara merupakan bentuk representasi dari cita-cita, strategi, tindakan, metode dan sebagainya dalam melakukan hubungan dengan aktor-aktor internasional.<sup>1</sup> Kebijakan luar negeri inilah yang menjadi penentu sikap suatu negara terhadap negara lain. Salah satu kebijakan luar negeri yang menarik dilihat adalah kebijakan dari negara yang tengah *rising* di Timur Tengah yaitu Turki.<sup>2</sup>

Pada tahun 2002, terjadi pergantian rezim di Turki yaitu keluarnya *Adelet ve Kalkinma Partisi* (AKP) sebagai partai dengan suara terbanyak di Turki. Saat itu, Recep Tayyip Erdogan sebagai pimpinan partai naik menjadi perdana menteri Turki.<sup>3</sup> Dibawah kepemimpinan Erdogan terjadi pergeseran dan perubahan kebijakan Turki, termasuk kebijakan luar negeri Turki. Erdogan merumuskan kebijakannya bersama dengan menteri luar negerinya saat itu yaitu Ahmet Davutoglu.

Bersama partai AKP, Ahmet Davutoglu dan Erdogan bertujuan untuk mengembalikan kejayaan kekaisaran Ottoman yang dulu atau mendirikan “Neo-Ottoman” sebagai sebuah negara hegemoni dalam kawasan. Hal ini diungkapkan

---

<sup>1</sup> Jacson Robert, Georg Sorensen. “*Pengantar Studi Hubungan Internasional.*” English: Oxford University Press, (2013)

<sup>2</sup> Baskan, Birol. “The Rise of Turkey and Qatar.” *Turkey and Qatar in the Tangled Geopolitics of Middle East* (2016)

<sup>3</sup> Karacasulu, Nilufer. “Interpreting Turkey’s Middle East Policy in the Last Decade.” *All Azimuth*, (2015) : 27-38

oleh Ahmet Davutoglu dalam pidatonya “*Just as we aspire for a new Turkey, we also aspire for a new Middle East.*”<sup>4</sup>

Untuk mewujudkan tujuan membentuk Neo-Ottoman, Turki memulai langkah awal dengan cara membangun kerjasama dan hubungan baik dengan negara-negara tetangganya, khususnya di kawasan Timur Tengah. Pemerintahan Erdogan memperkenalkan kebijakan luar negeri barunya dengan mengusung slogan “*zero problem with our neighbors.*”<sup>5</sup>

*Zero problem with our neighbors* merupakan kebijakan Turki dalam merangkum ekspektasi yang berkaitan tentang hubungannya dengan negara tetangga yang mengutamakan pendekatan *soft power*.<sup>6</sup> Turki ingin menghilangkan atau setidaknya meminimalisir sebanyak mungkin masalah dari hubungan mereka dengan negara-negara tetangga. Untuk itu, Turki sendiri mengatakan bahwasanya mereka akan lebih memilih untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara konstruktif daripada harus membekukannya.<sup>7</sup>

Kebuntuan Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa menjadikan pemerintahan Erdogan memilih untuk melakukan pergeseran kebijakan luar negerinya.<sup>8</sup> Hal ini diungkapkan oleh Ahmet Davutoglu dalam *vision paper* yang ditulisnya bahwa Turki akan berfokus untuk membangun kerjasama dalam kawasan Timur Tengah.<sup>9</sup>

---

<sup>4</sup> Nilufer Karacasulu

<sup>5</sup> Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs. “*Policy of Zero Problems with our Neighbors.*” 2014. <http://www.mfa.gov.tr/policy-of-zero-problems-with-our-neighbors.en.mfa> (diakses 15 Februari 2018)

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Ziya Onis, “Turkey and the Middle East after September 11: The Importance of the EU Dimension,” *Turkish Policy Quarterly* 2, no. 4 (2003): 83-92

<sup>9</sup> Amet Davutoglu, “Principles of Turkish Foreign Policy and Regional Political Structuring.” *Vision Paper Center for Strategic Research* no. 3, (2012)

Turki mulai aktif di wilayah regional Timur Tengah setelah peristiwa 9/11.<sup>10</sup> Setelah invansi Amerika Serikat ke Irak, mulai muncul 2 kekuatan besar di Timur Tengah yaitu Arab Saudi dan Iran. Ditengah persaingan kedua negara untuk mendominasi Timur Tengah, Turki memilih untuk tidak memihak kepada kedua pihak dan berusaha menjalin kerjasama dengan negara-negara di dunia. Turki memiliki posisi yang sangat strategis dengan letak negaranya yang berbatasan langsung dengan Eropa yang menjadikan Turki sebagai gerbang masuknya Eropa ke Timur Tengah. Turki juga memiliki kontrol penuh terhadap laut Hitam, laut Aegean dan laut Mediterania yang menjadi perlintasan kapal-kapal Eropa dan Timur Tengah.<sup>11</sup>

Turki sadar akan pentingnya menjaga stabilitas politik dan ekonomi serta integritas wilayah khususnya di kawasan Timur Tengah. Untuk itu, di awal kebijakan *zero problem with our neighbors* Turki langsung mencoba menjalin hubungan bilateral dengan negara-negara Timur Tengah seperti Qatar. Qatar merupakan negara monarki kecil yang terletak di Teluk Arab yang saat ini menjadi salah satu negara dengan tingkat perekonomian sangat maju. Hal ini dapat dilihat dari tingginya GDP per kapita Qatar yang mencapai USD 59.000. Setelah eksplorasi minyak besar-besaran, ekonomi Qatar mulai meningkat pesat dan membuat negara ini dapat berkiprah baik di wilayah Timur Tengah maupun Internasional.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Birol Baskan, "The Rise of Turkey and Qatar." *Turkey and Qatar in the Tangled Geopolitics of Middle East* (2016)

<sup>11</sup> Austvik, Ole G. Rzayeva, Gulmira. "Turkey in Geopolitics of Natural Gas." *Mossavar-Rahmani Center for Business & Government* no. 66, (2016) (diakses 5 Februari 2018)

<sup>12</sup> Religious Literacy Project. "Country Profile: Qatar." *Harvard Divinity Profile* (2016), (diakses 20 Februari 2018)

Turki dan Qatar tidak terlalu mendapat gangguan ketika Amerika Serikat menginvasi Irak. Setelah gejolak demokrasi mulai memasuki kawasan Timur Tengah, Turki memanfaatkan kesempatan itu untuk berperan sebagai agen perdamaian di Timur Tengah.<sup>13</sup> Pada saat itu, dengan model negara demokrasi dan pro Barat, Turki berhasil mendapatkan simpati dari negara barat. Sedangkan Qatar memanfaatkan momen itu untuk memperkuat perjanjian militernya dengan Amerika Serikat yang sudah terbentuk sebelumnya pada masa perang Teluk.<sup>14</sup> Qatar pun menjadi daerah basis militer dari Amerika Serikat selama invansi ke Irak. Dengan amannya posisi Turki dan Qatar, situasi ini dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian dengan menjalin kerjasama dengan semua aktor internasional. Turki dan Qatar juga tidak terlibat dalam persaingan hegemoni antara Iran dengan Arab Saudi dan memilih untuk bersikap netral.<sup>15</sup>

Turki dan Qatar sebenarnya tidak memiliki sejarah kerjasama bilateral yang banyak sehingga dapat dikatakan kedua negara dulunya tidak begitu dekat. Setelah merdeka pada tahun 1971, beberapa tahun setelahnya Qatar mulai membangun hubungan diplomatik dengan Turki.<sup>16</sup> Namun baru pada tahun 1985 kedua negara menandatangani perjanjian kerjasama untuk pertama kalinya.<sup>17</sup> Setelah perjanjian tersebut kedua negara tidak pernah lagi menandatangani perjanjian kerjasama sampai memasuki tahun 2000-an.

Memasuki tahun 2000-an dan pemerintahan Turki mulai diambil alih oleh AKP, Turki dan Qatar mulai melakukan hubungan kerjasama kembali. Mulai dari

---

<sup>13</sup> Baskan, Birol. "The Rise of Turkey and Qatar." *Turkey and Qatar in the Tangled Geopolitics of Middle East* (2016)

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Ali Unal, "Turkey, Qatar have constructive influence in region, says envoy," *Daily Sabah*, (Mei 8, 2014) <https://www.dailysabah.com/politics/2014/05/09/turkey-qatar-have-constructive-influence-in-region-says-envoy> (diakses 20 Maret 2018)

<sup>17</sup> *Ibid*

beberapa perjanjian ekonomi dan teknologi hingga kerjasama militer. Turki dan Qatar mulai dekat ketika terjadi gejolak demokrasi atau lebih dikenal dengan fenomena *Arab Spring* sedang berlangsung di Timur Tengah pada tahun 2011. Hal ini diungkapkan langsung oleh duta Qatar di Turki, Salem Bin Mubarak Al Shafi:

*in particular, the bilateral relations gained further momentum in the 2000s and I sincerely would like to express that after 2011, the bilateral relations reached a level of harmonization and coordination thanks to the wisdom of the two countries' leaderships.*<sup>18</sup>

Kemiripan sikap dan kebijakan kedua negara dalam menanggapi gejolak demokrasi tersebut, akhirnya menuntun kedua negara untuk menandatangani kerjasama militer dalam MoU untuk mendirikan *High-level Strategic Cooperation Council*.<sup>19</sup>

Perjanjian kerjasama militer antara Turki dan Qatar ini ditandatangani pada Desember 2014.<sup>20</sup> Perjanjian ini pada intinya membicarakan tentang pendirian sebuah pangkalan militer Turki di Qatar. Pangkalan militer ini merupakan pangkalan militer Turki yang pertama yang didirikan di Timur Tengah.<sup>21</sup> Tujuan akhir dari pangkalan ini yaitu untuk menempatkan 3.000 tentara Turki dan melakukan latihan bersama dengan militer Qatar. Latihan militer ini sudah mulai dilakukan pada Agustus 2017 yaitu terdapat 250 orang tentara Turki melakukan latihan gabungan dengan militer Qatar.<sup>22</sup> Namun disaat kerjasama militer ini tengah berlangsung, hubungan Qatar dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Mesir mulai memanas hingga puncaknya pada tahun

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Aras, Bülent; Akpınar, Pınar. "Turkish Foreign Policy and the Qatar Crisis." *Istanbul Policy Center* (Agustus 2017)

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Ibid*

2017 negara-negara tersebut melakukan pemutusan hubungan dan blokade terhadap Qatar.<sup>23</sup>

Blokade yang dilakukan oleh beberapa negara Timur Tengah ini diprakarsai oleh Arab Saudi dan UEA melalui isu yang dikembangkan oleh media mereka terhadap Emir Qatar yang merupakan puncak dari tensi yang memanas dengan Qatar.<sup>24</sup> Koalisi yang dipimpin Arab Saudi menuding Qatar telah membantu kelompok teroris di Timur Tengah, menyiarkan propaganda menggunakan media populer mereka *Al-Jazeera*, dan mulai membangun kedekatan dengan Iran yang merupakan ancaman bagi *Gulf Cooperation Council* (GCC).<sup>25</sup> Akibatnya pada Juni 2017, koalisi Arab Saudi secara serentak mengumumkan akan melakukan blokade terhadap Qatar.<sup>26</sup> Mereka memutuskan hubungan diplomatik dan menutup semua lini yang berkaitan dengan Qatar seperti produk Qatar dan jalur penerbangan menuju Qatar.<sup>27</sup> Diplomat Qatar yang berada di negara koalisi Arab Saudi diberi waktu 48 jam untuk meninggalkan negara mereka sementara warga negara Qatar diberi tenggat waktu 2 minggu.<sup>28</sup>

Setelah blokade tersebut dilakukan, Turki berupaya menjadi penengah dengan menawarkan diri sebagai mediator. Namun penawaran Turki tersebut ditolak meskipun Erdogan sendiri secara langsung pergi menemui para pemimpin

---

<sup>23</sup> Khalil E. Jahshan, "Crisis in The Gulf Cooperation Council: Challenges and Prospects," *Arab Center Washington DC*, (2017) (diakses 20 Maret 2018)

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> *Gulf Cooperation Council* (GCC) merupakan organisasi politik regional yang terdiri dari negara-negara monarki di Teluk Persia yang kaya energi. Anggotanya adalah Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates. GCC adalah blok dagang yang memiliki banyak tujuan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.

<sup>26</sup> Lynch, March. "The Qatar Crisis." *Project on Middle East Political Science* no.31 (October 2017) (diakses 20 Februari 2018)

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Policy Analysis Unit, "The Crisis in Gulf Relations: Old Rivalries, New Ambitions," *Arab Center for Research and Policy Studies* (2017) : 7-11 (diakses 20 maret 2018)

negara-negara GCC.<sup>29</sup> Sebagai gantinya, Koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi menunjuk Kuwait dan Amerika Serikat sebagai mediator dari permasalahan ini. Setelah dimediasi oleh Kuwait dan Amerika Serikat, koalisi yang dipimpin Arab Saudi ini menuntut Qatar dalam 13 poin tuntutan.<sup>30</sup> Beberapa poin dari tuntutan tersebut seperti; mengurangi hubungan diplomatik dengan Iran, menutup pangkalan militer Turki di Qatar, memutuskan hubungan dan pendanaan untuk organisasi "teroris" dan individu, menyerahkan pembangkang dari Arab Saudi, UEA, Mesir dan Bahrain yang tinggal di Qatar dan membekukan aset mereka, mengakhiri campur tangan Qatar dalam urusan negara-negara tersebut, mematikan jaringan berita Al-Jazeera dan media lainnya, menyelaraskan kebijakan Qatar dengan negara-negara Teluk dan Arab lainnya, yang terakhir membayar reparasi dan kompensasi.<sup>31</sup>

Salah satu dari 13 tuntutan yang diberikan koalisi Arab Saudi kepada Qatar adalah untuk menutup pangkalan militer Turki di Qatar. Permintaan ini menandakan hubungan Turki dengan koalisi yang dipimpin Arab Saudi juga sudah mulai kurang baik, khususnya dengan Arab Saudi sendiri.<sup>32</sup> Turki sebelumnya memiliki hubungan yang dekat dengan pangeran Mohammed bin Nayef, putra mahkota Arab Saudi. Namun setelah absen selama dua tahun terakhir, bin Nayef diganti oleh putra mahkota yang baru yaitu Mohammed bin Salman dan kemudian hubungan Turki dengan Arab Saudi mulai dingin. Hal ini

---

<sup>29</sup> Aras, Bülent; Akpınar, Pınar. "Turkish Foreign Policy and the Qatar Crisis." *Istanbul Policy Center* (Agustus 2017)

<sup>30</sup> "Arab states issue 13 demands to end Qatar-Gulf crisis." *Al Jazeera* Juli 2017 (<http://www.aljazeera.com/news/2017/06/arab-states-issue-list-demands-qatar-crisis-170623022133024.html>)

<sup>31</sup> ACW Research and Analysis Unit, "Saudi, UAE Demands to End Qatar Crisis: Commands, Diktats, and Ultimatums," *Arab Center Washington DC* (2017) : 29-40 (diakses 20 Maret 2018)

<sup>32</sup> Mustafa Gurbuz, "Impact Of Interference In Turkish-Qatari Relations," *Arab Center Washington DC* (2017) : 31

ditandai dengan ditolaknya berbagai undangan Erdogan kepada bin Salman untuk mengunjungi Ankara.<sup>33</sup> Padahal, Turki dan Arab Saudi telah berbagi kepentingan bersama di Suriah dan Irak, terutama pada perang saudara di Suriah. Bin Salman melihat, kerjasama militer antara Turki dengan Qatar ini merupakan bentuk dukungan Turki terhadap Qatar dalam krisis tersebut dan Arab Saudi perlu mengambil kebijakan tegas dengan menuntut untuk menutup kerjasama militernya.

Menanggapi tuntutan tersebut, pejabat Turki mengatakan tidak akan membatalkan kerjasama militernya dengan Qatar.<sup>34</sup> Respon ini tentu akan semakin memperumit hubungan Turki dengan koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kerjasama pangkalan militer yang dilakukan oleh Turki dengan Qatar merupakan sebuah permasalahan dalam krisis yang melanda Qatar. Koalisi tersebut tentu akan menganggap Turki sebagai masalah dan ini sangat bertentangan dengan kebijakan luar negeri yang mereka gunakan dalam mendekati negara-negara Timur Tengah, yaitu kebijakan *zero problem with our neighbors*. Sebuah kerjasama dalam bentuk pendirian pangkalan militer dengan negara yang tengah dianggap sebagai *common enemies* oleh banyak negara disekitarnya tentu akan menimbulkan pertentangan. Kerjasama militer yang dilakukan Turki ditengah krisis yang dialami oleh Qatar inilah yang menjadi pokok permasalahan bagi peneliti dan penting untuk diteliti.

## 1.2 Rumusan Masalah

Turki merupakan salah satu negara yang tengah bangkit dalam perpolitikan internasional. Dengan tidak adanya kepastian untuk bergabung

---

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> *Ibid*

dengan Uni Eropa, Turki memindahkan fokus politik luar negerinya ke wilayah Timur Tengah. Dalam salah satu kebijakan luar negerinya untuk membentuk kembali masuk ke Timur Tengah, Erdogan menyuarakan slogan “*zero problem with our neighbors.*” Kebijakan ini menyatakan bahwa fokus Turki ke wilayah Timur Tengah dan menghilangkan atau meminimalisir semua permasalahannya dengan negara tetangga. Dalam upaya mewujudkan “Neo-Ottoman” tersebut, Turki menjalin kerjasama militer dengan Qatar. Namun, ketika kerjasama tersebut berlangsung hubungan Qatar dengan negara GCC mulai memanas hingga akhirnya diblokade oleh koalisi negara teluk yang diprakarsai Arab Saudi dan UEA. Meskipun posisi Qatar sedang bermasalah tetapi Turki tetap melanjutkan kerjasamanya. Sikap Turki ini dapat menimbulkan permasalahan yang tentu bertentangan dengan slogan kebijakan luar negeri *zero problem with our neighbors.* Tindakan pemerintah Turki yang bertentangan dengan slogan kebijakan luar negeri *zero problem with our neighbors* merupakan permasalahan utama yang akan peneliti jelaskan.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai:

“Mengapa Turki tetap melakukan kerjasama militer dengan Qatar ditengah krisis Qatar tahun 2017”

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk menjelaskan alasan dibalik kebijakan luar negeri Turki yang tetap menjalin kerjasama militer dengan Qatar.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai:

1. Sebagai bekal, tambahan wawasan dan latihan dalam memecahkan masalah bagi peneliti sebagai calon lulusan studi Ilmu Hubungan Internasional.
2. Memberikan referensi kepada para penstudi Ilmu Hubungan Internasional secara khusus maupun peneliti ilmu sosial politik secara umum dalam melihat permasalahan yang diteliti terkait analisis kebijakan luar negeri Turki.

## 1.6 Studi Pustaka

Untuk menganalisis permasalahan terkait judul yang diangkat, peneliti menggunakan beberapa studi pustaka yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Penelitian sebelumnya akan menjadi referensi dan tolak ukur bagi peneliti dalam mengembangkan penelitian.

Studi pustaka yang pertama adalah tulisan dari Birol Baskan yang berjudul *Turkey and Qatar in the Tangled Geopolitics of the Middle East*.<sup>35</sup> Tulisan tersebut membahas tentang dinamika hubungan Turki dan Qatar sejak pasca peristiwa 9/11. Tulisan ini juga membahas kesuksesan dan kegagalan Turki dan Qatar dalam perpolitikan internasional khususnya dikawasan Timur Tengah ditengah persaingan Arab Saudi dan Iran. Birol Baskan menyimpulkan bahwa dalam hubungan kedekatan Turki-Qatar pasca 9/11 dan fenomena *Arab spring*, akan membuat hubungan Turki dengan Arab sedikit merenggang dan dia menganalisis bahwa kedepannya Turki akan lebih dekat dengan Iran.

---

<sup>35</sup> Baskan, Birol. "The Rise of Turkey and Qatar." *Turkey and Qatar in the Tangled Geopolitics of Middle East*, 2016

Ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah akan dimanfaatkan Turki untuk mendekati negara-negara Teluk khususnya Qatar.

Tulisan ini dapat membantu peneliti dalam melihat dinamika kemunculan Turki dan Qatar di Timur Tengah dan mengetahui pergerakan politik luar negeri kedua negara di Timur Tengah. Namun dalam tulisan ini tidak membahas tentang kerjasama militer Turki dan Qatar serta juga tidak menyinggung tentang krisis yang dialami Qatar dengan negara GCC, sedangkan kedua hal tersebut menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti.

Studi pustaka yang kedua adalah tulisan dari Bulent Aras dan Pinar Akpınar yang berjudul *Turkish Foreign Policy and the Qatar Crisis*.<sup>36</sup> Tulisan tersebut menganalisis tentang latar belakang hubungan Turki dengan Qatar ditengah krisis yang berlangsung dikawasan Teluk. Hal ini bertujuan untuk melihat apakah hubungan kedua negara akan tetap berlanjut atau malah berakhir setelah krisis tersebut selesai. Tulisan ini juga membahas tentang dilema Turki dalam penggunaan *soft power* dan *hard power* di Timur Tengah khususnya selama krisis Teluk yang sedang berlangsung.

Aras dan Akpınar menyimpulkan bahwasanya, kegagalan Turki dalam memanfaatkan krisis di Teluk membuat Turki mulai kehilangan tempat berpijaknya di Timur Tengah. Ditambah lagi dengan sikap yang sudah diambil Turki dari awal untuk tidak berpihak kepada Iran maupun Arab Saudi. Tulisan ini membantu peneliti dalam membahas keterkaitan dalam penggunaan *hard power* yaitu kerjasama pendirian pangkalan militer oleh Turki di Qatar. Namun dalam tulisan tersebut, mereka tidak menganalisis kebijakan luar negeri Turki yaitu *Zero*

---

<sup>36</sup> Aras, Bülent; Akpınar, Pinar. "Turkish Foreign Policy and the Qatar Crisis." *Istanbul Policy Center*, Agustus 2017

*problem with our neighbors*. Sementara peneliti mengkaitkan kerjasama militer ini dengan kebijakan *Zero problem with our neighbors*.

Studi pustaka yang ketiga adalah buku yang ditulis oleh George Doumar dkk yang berjudul *Crisis in The Gulf Cooperation Council: Challenge and Prospect*.<sup>37</sup> Dalam buku ini secara keseluruhan membahas tentang bagaimana krisis yang terjadi antara negara-negara GCC. Terdapat penjelasan mengenai latar belakang terjadinya krisis tersebut, bagaimana posisi Qatar ditengah krisis tersebut, lalu mengenai dampaknya terhadap pasar minyak dunia dan juga mengenai prospek dan tantangan kedepan mengenai krisis tersebut. Buku tersebut juga menyinggung sedikit mengenai Turki dan Amerika dalam krisis negara-negara GCC.

Buku ini membantu peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai krisis yang dialami Qatar dan juga mengenai hubungan Qatar dengan negara-negara di GCC dan kemudian juga sedikit menyinggung tentang Turki dalam krisis tersebut. Tetapi buku tersebut tidak menjelaskan lebih detail mengenai kerjasama militer yang dilakukan oleh Turki dan Qatar. Sedangkan peneliti ingin meneliti mengenai kerjasama militer tersebut.

Studi pustaka yang keempat adalah tulisan dari Nilüfer Karacasulu yang berjudul *Interpreting Turkey's Middle East Policy in the Last Decade*.<sup>38</sup> Dalam tulisan ini, dia membahas tentang perubahan kebijakan luar negeri Turki di Timur Tengah. Sejak rezim AKP memerintah Turki pada tahun 2002, Turki telah memperlihatkan minatnya terhadap Timur Tengah. Turki telah banyak melakukan

---

<sup>37</sup> Doumar, George. Dkk, "Crisis in The Gulf Cooperation Council: Challenge and Prospect." *Arab Center Washington DC*. Washington (2017)

<sup>38</sup> Karacasulu, Nilufer. "Interpreting Turkey's Middle East Policy in the Last Decade." *All Azimuth*, (2015)

perubahan kebijakan luar negeri di Timur Tengah dan kebijakannya itu mengindikasikan tujuan Turki untuk menjadi *regional power* di Timur Tengah dengan cara membentuk visinya melalui pendekatan berbasis nilai dan prinsip. Untuk memperjelas visi ini, tulisan tersebut menganalisis nilai-nilai inti dan prinsip-prinsip yang didefinisikan dalam kebijakan luar negeri Turki dalam dekade terakhir, yang merupakan identitas internasional Turki di Timur Tengah. Tulisan ini menyimpulkan bahwa telah terjadi perubahan taktis terutama dalam kebijakan luar negeri Turki secara umum, dan khususnya ke Timur Tengah.

Tulisan Karacasulu ini membantu peneliti dalam memberikan informasi mengenai perubahan kebijakan luar negeri Turki hingga munculnya kebijakan *zero problem with our neighbors*. Dalam tulisan ini, dia juga menjelaskan mengenai visi dan misi Turki di Timur Tengah yang sangat berguna dalam penelitian yang akan diteliti. Namun, dalam tulisannya belum menjelaskan mengenai kebijakan kerjasama militer antara Turki dan Qatar.

Studi pustaka yang kelima adalah tulisan Antoine Vagneur-Jones dan Can Kasapoglu yang berjudul *Bridging the Gulf: Turkey's forward base in Qatar*.<sup>39</sup> Dalam tulisan ini, mereka membahas tentang blokade Qatar dan kerjasama militer Qatar dengan AS dan juga kerjasama militer Qatar dengan Turki. Pada awal pembahasan mereka sedikit membahas tentang militer AS di Qatar, kemudian mereka menjabarkan tentang pembangunan basis militer Turki di Qatar yang menjadi permasalahan dalam krisis di Teluk. Banyak pertentangan yang timbul akibat kerjasama militer yang dilakukan oleh Turki dengan Qatar terutama dari Arab Saudi dan UEA. Dari pertentangan tersebut, mereka menyimpulkan

---

<sup>39</sup> Antoine Vagneur-Jones, Can Kasapoglu, "Bridging the Gulf: Turkey's forward base in Qatar," *Foundation pour la Recherche Strategique* no. 16, (Agustus 2017) (diakses 23 Maret 2018)

bahwasanya kerjasama militer tersebut tetap berlanjut karena ada perhitungan untung rugi yang telah di perhitungkan oleh Turki.

Tulisan dari Jones dan Kasapoglu ini membantu peneliti dalam menyediakan informasi mengenai kerjasama militer antara Turki dengan Qatar, serta menjadi sumber yang penting dalam membantu menjawab pertanyaan penelitian bagi peneliti. Namun, tulisan tersebut tidak mempermasalahkan kebijakan luar negeri Turki sebelumnya yaitu kebijakan *zero problem with ours neighbors*.

## **1.7 Kerangka Konseptual**

### **1.7.1 Foreign Policy Analysis**

Penelitian ini menggunakan konsep analisis kebijakan luar negeri, dimana konsep ini merupakan salah satu alat untuk mengidentifikasi dan menganalisis suatu kebijakan luar negeri yang digunakan oleh negara.<sup>40</sup> J. F Morin dan J. Paquin menjelaskan dalam menganalisis kebijakan luar negeri suatu negara dapat dilihat menggunakan alat analisis yaitu melalui *goals of foreign policy*.<sup>41</sup> Morin dan Paquin melihat bahwasanya kebijakan luar negeri bertujuan untuk menciptakan stabilitas sistem internasional, akumulasi kekayaan, peningkatan *relative power*, menjaga *power* dari seorang pemimpin atau reproduksi dari identitas nasional.

#### **1.7.1.1 Goals of Foreign Policy**

Tujuan dari sebuah kebijakan luar negeri suatu negara tidak dapat diketahui secara langsung ketika kebijakan tersebut dikeluarkan oleh negara.

---

<sup>40</sup> J.-F. Morin, J. Paquin, "How to Identify and Assess a Foreign Policy?," *Foreign Policy Analysis: A Toolbox* (2018,) : 17-31

<sup>41</sup> *Ibid*, 18

Terkadang, kebijakan yang dibuat negara dan disampaikan oleh pemerintah belum tentu satu tujuan seperti yang disampaikan, bisa jadi ada tujuan lain yang ingin diraih oleh negara tersebut. Untuk itu perlu adanya analisis lebih lanjut untuk mengetahui tujuan dari kebijakan luar negeri tersebut. Morin dan Paquin menjelaskan bahwa untuk mengidentifikasi tujuan dari kebijakan luar negeri negara dapat dilihat melalui empat indikator yaitu *the goals communicated*, doktrin, kepentingan nasional, dan *deducing the goals pursued*.

**a. *The goals communicated***<sup>42</sup>

Tujuan dari kebijakan luar negeri suatu negara, dalam beberapa kasus, dapat dilihat dari pernyataan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Pernyataan kebijakan, pidato resmi, laporan pemerintah ke parlemen dan *white paper* dapat digunakan sebagai sumber informasi. Tujuan dari kebijakan luar negeri melalui pernyataan publik ini dapat dilihat dari empat elemen: target, arah, hasil yang diharapkan, dan skala waktunya. Meskipun terkadang tidak semua dari keempat elemen ini ada dalam sebuah pernyataan publik pemerintah.

Selanjutnya, setiap pernyataan kebijakan secara publik yang dilakukan pemerintah ini akan menimbulkan pertanyaan bagi para analis kebijakan luar negeri tentang apakah ada perbedaan antara tujuan yang disampaikan dengan tujuan yang sebenarnya ingin dicapai negara. Setidaknya ada tiga alasan dari perbedaan tersebut.

Pertama untuk menjaga reputasi dan legitimasinya di internasional, negara akan menyembunyikan tujuan sebenarnya dibalik tujuan yang mereka sampaikan. Misalnya seperti pembatasan perdagangan untuk melindungi industri lokal

---

<sup>42</sup> *Ibid*: 19

mungkin akan dinyatakan dalam bentuk isu lingkungan. Kedua, para pemimpin biasanya akan mengurangi tujuan kebijakannya agar kemungkinan berhasilnya besar sehingga nantinya akan meningkatkan status mereka di panggung politik nasional. Ketiga, para pembuat keputusan cenderung akan menghindari pengakuan tujuannya secara terbuka karena dapat merusak kredibilitas nasional dan internasional negara. Contohnya seperti intervensi militer untuk menggulingkan pemerintah lawan, secara komunikasi juga sebagai cara untuk menunjukkan kekuatan dari negara tersebut, namun jika hal itu dinyatakan tentu akan mengurangi kredibilitas negara. Sehingga pernyataan publik dari pemerintah perlu ditelusuri lebih dalam.

#### **b. Doktrin<sup>43</sup>**

Cara lain untuk mengidentifikasi kebijakan luar negeri pemerintah adalah dengan mencari doktrin yang ada di pemerintahan. Doktrin merupakan kumpulan dari kepercayaan, aturan dan prinsip yang menuntun kebijakan luar negeri. Doktrin ini sebagai kerangka yang memandu pemerintah dalam menjalankan tugas dan misinya dalam sistem internasional. Sebuah doktrin biasanya diringkas dalam sebuah pernyataan atau dalam dokumen resmi untuk mengkomunikasikan prioritas dan tujuan pemerintah kepada khalayak domestiknya serta aktor asing. Melalui doktrin ini dapat dilihat kebiasaan negara dan memprediksi kebijakan yang akan dibuat oleh negara. Namun terkadang doktrin cenderung menimbulkan distorsi antara sistem kepercayaan pemerintah (kecenderungan politik) dengan kebijakan yang dibuat pemerintah. Sehingga para analis tidak dapat hanya bergantung pada doktrin saja untuk mengidentifikasi tujuan kebijakan luar negeri.

---

<sup>43</sup> *Ibid*: 21

### c. Kepentingan Nasional<sup>44</sup>

Para pemimpin politik seringkali bersembunyi dibalik kepentingan nasional negaranya ketika ditanyai mengenai tujuan kebijakan luar negeri mereka. Namun sebenarnya, seringkali tujuan politiklah yang mendefinisikan konsep kepentingan nasional dan bukan sebaliknya. Kebijakan luar negeri suatu negara dapat dipengaruhi oleh kepentingan nasional negara tersebut. David Callahan menjelaskan untuk memahami kepentingan nasional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 'kebutuhan' dan 'keinginan' dari pemerintah. Kebutuhan ini merupakan kepentingan yang sangat vital bagi negara seperti menyangkut keamanan dan kedaulatan negara. Sedangkan keinginan adalah segala sesuatu yang tidak memiliki dampak langsung kepada keamanan dan kedaulatan negara. Untuk itu, para analis kebijakan luar negeri tidak dapat melihat kepentingan nasional dari apa yang dinyatakan oleh para pemimpin politik saja, melainkan mereka harus mendefinisikan konsep kepentingan nasional dari kebijakan-kebijakan yang dibuat sebelumnya.

Donal E. Nuechterlein menjelaskan secara dasar kepentingan nasional terbagi menjadi empat bentuk:

- a. Kepentingan pertahanan : yaitu perlindungan terhadap negara beserta warganya dari ancaman kekerasan dari negara lain dan atau ancaman dari luar terhadap pemerintah.
- b. Kepentingan ekonomi : yaitu dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi negara dalam berhubungan dengan negara lain.

---

<sup>44</sup> *Ibid*: 23

- c. Kepentingan untuk tatanan dunia : yaitu upaya untuk menjaga sistem politik dan ekonomi internasional agar negara merasa aman, dan warganya dapat secara aman melakukan kegiatan perdagangan dengan damai diluar batas negaranya.
- d. Kepentingan ideologi : yaitu perlindungan dan keberlangsungan dari serangkaian nilai-nilai yang dipercaya oleh orang-orang dalam negara dan dipercaya untuk menjadi baik secara universal.<sup>45</sup>

**d. Deducing The Goals Pursued<sup>46</sup>**

Terkadang dalam setiap kebijakan luar negeri yang diumumkan secara publik oleh pemerintah terlalu meluas dan ambigu sehingga perlu analisis lebih lanjut untuk mengetahui tujuan dari kebijakan luar negeri tersebut. salah satu teknik yang digunakan untuk mempersempit tujuan dari kebijakan luar negeri tersebut adalah dengan melihat kebiasaan dan tingkah laku negara, bukan melalui pernyataan publik. Cara lain untuk melihatnya adalah dengan melihat variabel-variabel yang mempengaruhi pemerintah dalam membuat kebijakan.

Tabel 1.1  
*Goals of Foreign Policy*

Indikator	Keterangan
<i>The goals communicated</i>	Tujuan yang disampaikan secara resmi oleh pemerintah
Doktrin	Nilai-nilai yang dianut didalam pemerintahan
Kepentingan nasional	Kepentingan politik, ekonomi, keamanan dan lainnya
<i>Deducing the goals pursued</i>	Mengerucutkan tujuan yang terlalu meluas

Sumber: diolah oleh peneliti

Berdasarkan penjelasan pada tabel diatas, konsep tersebut digunakan oleh peneliti untuk melihat *state behavior* dari Turki sehingga dapat mencari tahu

<sup>45</sup> Donal E. Nuechterlein, "National interests and foreign policy: A conceptual framework for analysis and decision-making," *Brit. J. International Studies* 2 (1976): 246-266

<sup>46</sup> *Ibid*, 25

tujuan dari kebijakan Turki untuk tetap melakukan kerjasama militer dengan Qatar.

## 1.8 Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang nantinya akan menghasilkan penemuan yang tidak bisa didapat jika menggunakan prosedur-prosedur lain dari kuantifikasi (pengukuran).<sup>47</sup>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksplanatif. Dalam pandangan Mohtar Mas'ood, menyebutkan bahwa penelitian eksplanatif merupakan suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan mengkaji fenomena yang dibahas menjadi lebih rinci dengan mendeskripsikan ucapan, tulisan, atau perilaku dari suatu individu, kelompok, organisasi maupun negara.<sup>48</sup> Dalam penelitian ini akan diidentifikasi dan dijelaskan mengenai alasan Turki melakukan kerjasama militer dengan Qatar.

### 1.8.1 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini tidak melebar dari apa yang telah dirumuskan sebelumnya, peneliti membatasi pada gambaran dan analisis tentang kerjasama militer Turki dan Qatar dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Tahun 2014 merupakan awal kesepakatan antara Turki dan Qatar untuk mendirikan pangkalan militer Turki di Qatar. Sementara tahun 2018 merupakan tahun terbaru dari kelanjutan pertemuan Turki dan Qatar yang membahas tentang kerjasama militer ini dan juga ketersediaan data.

---

<sup>47</sup> Jane Ritchie and Jane Lewis, *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Student and Researchers*, London: Sage Publications, (2003) : 3.

<sup>48</sup>Mohtar Mas'ood, "Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi," *Pusat Antar Universitas- Studi Sosial Universitas Gajah Mada*, LP3ES: Yogyakarta, (1990): 39

### 1.8.2 Unit dan Level Analisis

Unit analisis atau biasa disebut variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pemerintah Turki. Hal ini karena yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Pemerintah Turki. Sedangkan unit eksplanasi atau disebut sebagai variabel independen dalam penelitian ini adalah kerjasama militer Turki dengan Qatar.<sup>49</sup> Selanjutnya, level analisis merupakan tingkat atau posisi dari unit yang akan dijelaskan. Dalam hal ini, level analisisnya adalah negara karena yang dibahas adalah kerjasama antar negara dan fokusnya adalah negara Turki.

### 1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk mencari dan mengumpulkan informasi tentang pengetahuan yang sedang dipelajari. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan dengan mempelajari penelitian atau informasi-informasi yang didapat berupa: jurnal, dokumen, buku-buku, *website* dan sumber berita terkait dengan pemerintahan Turki dan juga kerjasama militer Turki dan Qatar. Berdasarkan jenisnya, penelitian yang akan dilakukan menggunakan data sekunder atau *secondary resource*.

### 1.8.4 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan proses keberlanjutan dalam mengolah data-data yang didapat secara mendalam. Peneliti menggunakan analisis data kualitatif yang merupakan identifikasi dan pencarian pola-pola umum hubungan dalam kelompok data, yang menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan.<sup>50</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dan mengelompokkan data tersebut

---

<sup>49</sup> *Ibid*, 260-261

<sup>50</sup> Chaterine Marshall dan Gretchen B. Rossman, *Designing Qualitative Research* (California: Sage Publications, 1999): 150

kemudian mereduksi data tersebut, penyajian data kemudian dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis eksplanasi dimana akan menjelaskan dengan dideskripsikan, dijelaskan, diramalkan kedalam sebuah penelitian sehingga mampu menjawab permasalahan peneliti. Data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, penelitian ilmiah, buku, jurnal, website resmi pemerintahan Turki. Proses tersebut akan menghubungkan data satu dan lainnya sehingga seluruh data yang diperoleh akan memiliki hubungan yang jelas dan dapat menjelaskan apa yang ingin peneliti teliti.

Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan alasan mengapa Turki tetap mempertahankan kerjasama militer dengan Qatar dengan melihat tujuan yang ingin dicapai Turki melalui kerjasama tersebut. Untuk mengetahui tujuan tersebut, peneliti menggunakan konsep *goals of foreign policy* dari J.F Morin dan J. Paquin dengan menggabungkan indikator-indikator yang ada dalam konsep dan kemudian mengerucutkannya lalu menarik kesimpulan.

## **1.9 Sistematika Penelitian**

### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penelitian. Bab 1 ini menggambarkan mengenai penelitian yang akan dilakukan.

### **Bab II : Kebijakan Luar Negeri Turki**

Bab ini berisi tentang gambaran umum terkait internal pemerintahan Turki dan kebijakan luar negeri yang dikeluarkan pemerintah Turki

### **Bab III : Kerjasama Militer Turki-Qatar dan Krisis Diplomatik Qatar**

Bab ini menjelaskan tentang kerjasama militer yang dilakukan Turki dengan Qatar dan krisis diplomatik yang tengah melanda Qatar.

### **Bab IV: Analisis Kerjasama Militer Turki-Qatar**

Bab ini berisi tentang analisis terkait kerjasama militer antara Turki dengan Qatar menggunakan konsep yang sudah disampaikan diatas.

### **Bab V: Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

